

Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Fazura Nur Sabila^{1*}, Sugiarti², Faiz Rahman Siddiq³

^{1,2,3} Universitas Setia Budi

* E-mail Korespondensi: fazuranursabila@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 01-05-2026

Revision: 18-05-2026

Published: 18-05-2026

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i2.443

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia periode 2020–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausalitas. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah provinsi di Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 34 provinsi selama empat tahun pengamatan sehingga diperoleh 136 observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah, sedangkan Dana Perimbangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan variabel dan ruang lingkup penelitian yang hanya mencakup pemerintah provinsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, *Leverage*

A B S T R A C T

This study aimed to analyze the effect of Local Own-Source Revenue, Intergovernmental Transfers, Capital Expenditure, Government Size, and Leverage on the financial performance of provincial governments in Indonesia during the 2020–2023 period. This research used a quantitative approach with a causal research design. The data used were secondary data obtained from the Budget Realization Reports of provincial governments in Indonesia. The sampling technique used purposive sampling with 34 provinces observed over four years, resulting in 136

Acknowledgment

observations. The data analysis technique employed multiple linear regression analysis using SPSS software. The results indicated that Local Own-Source Revenue, Intergovernmental Transfers, Capital Expenditure, Government Size, and Leverage affected local government financial performance. Local Own-Source Revenue and Capital Expenditure had a positive effect on improving regional fiscal independence, while Intergovernmental Transfers indicated that local governments still depended on central government funding. This study was limited to several variables and only focused on provincial governments. The findings were expected to contribute to improving the effectiveness of regional financial management and strengthening regional fiscal independence.

Key word: *Local Own-Source Revenue, Intergovernmental Transfers, Capital Expenditure, Local Government Financial Performance, Leverage*

© 2026 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Pemerintah daerah dituntut mampu mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam era desentralisasi fiskal, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan menjadi faktor utama dalam menciptakan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu komponen utama dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggalang potensi ekonomi lokal melalui pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber pendapatan lainnya. Menurut Atmoko dan Khairudin (2022), PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Daerah dengan PAD yang tinggi cenderung memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. Namun, pada kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu mengoptimalkan PAD sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi.

Selain PAD, Dana Perimbangan juga memiliki peran penting dalam struktur pendapatan pemerintah daerah. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah guna mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana ini terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut Sari dan Halmawati (2021), Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Akan tetapi, penelitian Putri dan Darmayanti (2019) menunjukkan bahwa ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap Dana Perimbangan dapat menurunkan tingkat kemandirian fiskal daerah dan memunculkan fenomena *flypaper effect*, yaitu kondisi ketika pemerintah daerah lebih bergantung pada dana transfer dibandingkan mengoptimalkan PAD.

Belanja modal juga menjadi faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, dan infrastruktur lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Menurut Yuliansyah et al. (2020), belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, Ratnasari dan Meirini (2022) menemukan bahwa belanja modal yang tidak dialokasikan secara efektif justru dapat menurunkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan anggaran belanja modal menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Ukuran pemerintah daerah juga menjadi variabel yang diduga memengaruhi kinerja keuangan daerah. Ukuran pemerintah daerah umumnya diukur berdasarkan total aset atau total belanja daerah. Pemerintah daerah dengan ukuran yang besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih banyak dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Firmansyah et al. (2024) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Namun, Wulandari et al. (2022) mengungkapkan bahwa ukuran pemerintah yang terlalu besar dapat meningkatkan kompleksitas birokrasi dan beban administrasi sehingga berpotensi menurunkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, *Leverage* juga menjadi faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Leverage* menggambarkan tingkat penggunaan utang dalam membiayai aktivitas pemerintahan daerah. Penggunaan utang yang dikelola secara optimal dapat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Iszardani dan Hardiningsih (2021) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, Nurhaeda dan Tenriola (2022) menjelaskan bahwa *Leverage* yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko fiskal dan mengurangi fleksibilitas keuangan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.

Fenomena ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat masih menjadi permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Penelitian Radjak dan Latarang (2021) menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung lebih mengandalkan Dana Perimbangan dibandingkan mengoptimalkan PAD. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih rendah sehingga berpotensi menghambat efektivitas pembangunan daerah. Selain itu, rendahnya kemampuan daerah dalam mengelola PAD dapat menyebabkan ketidakefisienan pengelolaan anggaran dan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan sebelumnya, namun masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Sari dan Halmawati (2021) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan Ratnasari dan Meirini (2022) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian mengenai Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Leverage* juga menunjukkan hasil yang belum konsisten. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan teori stakeholder dan teori stewardship sebagai landasan teoritis. Teori stakeholder menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, teori stewardship menekankan bahwa aparatur pemerintah bertindak sebagai pengelola amanah publik yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya daerah secara efektif demi kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah,

dan *Leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia tahun 2020–2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausalitas yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengujian hubungan antar variabel melalui pengukuran data numerik dan analisis statistik. Desain penelitian kausal digunakan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 provinsi. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sebanyak 136 observasi penelitian yang berasal dari 34 provinsi selama empat tahun pengamatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2020–2023. Data diperoleh melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta portal resmi pemerintah daerah masing-masing provinsi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data laporan keuangan yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan maupun parsial. Sebelum dilakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi guna memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi dasar analisis linear. Model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DP + \beta_3 BM + \beta_4 UPD + \beta_5 LEV + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Kinerja Keuangan

α : Konstanta

β_{1-5} : Koefisien Regresi

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DP : Dana Perimbangan

BM : Belanja Modal

UPD : Ukuran Pemerintah Daerah

LEV : *Leverage*

ε : *error*

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji statistik t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, uji statistik F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan, serta uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Seluruh proses pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi Statistical Product and Service Solutions (SPSS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia periode 2020–2023. Populasi penelitian terdiri dari 34 pemerintah provinsi yang memenuhi kriteria *purposive sampling*. Berdasarkan periode pengamatan selama empat tahun, diperoleh total 136 observasi penelitian. Sampel dipilih berdasarkan ketersediaan laporan realisasi anggaran dan kelengkapan data variabel penelitian yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian. Statistik deskriptif meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan fiskal antar pemerintah provinsi di Indonesia, terutama dalam pengelolaan PAD dan belanja modal. Pemerintah daerah dengan PAD tinggi

cenderung memiliki tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik dibandingkan daerah yang masih bergantung pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan variasi yang cukup besar antar provinsi. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatan lokal. Provinsi dengan aktivitas ekonomi tinggi memiliki PAD yang lebih besar dibandingkan daerah dengan aktivitas ekonomi rendah. Dana Perimbangan juga menunjukkan nilai yang relatif tinggi pada beberapa daerah yang masih memiliki ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerataan fiskal masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Belanja Modal pemerintah daerah juga mengalami perbedaan yang signifikan. Pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal yang baik cenderung memiliki alokasi belanja modal yang lebih besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Sementara itu, variabel *Leverage* menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah memiliki tingkat kewajiban yang relatif rendah terhadap total aset daerah, sehingga risiko fiskal pemerintah daerah masih tergolong terkendali.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi dasar statistik. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga data penelitian dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan yang tinggi antar variabel independen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model penelitian

sehingga variabel independen dapat digunakan secara bersama-sama dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Berdasarkan hasil pengujian, nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan *Run Test*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga model regresi tidak mengalami autokorelasi. Dengan demikian, seluruh asumsi klasik telah terpenuhi dan model regresi layak digunakan dalam penelitian.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Model regresi yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DP + \beta_3 BM + \beta_4 UPD + \beta_5 LEV + \varepsilon$$

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen berada pada kategori cukup baik. Hal ini berarti bahwa PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Leverage* mampu menjelaskan variasi kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Hasil Uji Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD yang dimiliki pemerintah daerah, maka semakin baik pula kinerja

keuangan daerah tersebut. PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari dan Halmawati (2021) serta Atmoko dan Khairudin (2022) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingginya PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan aset daerah. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menyusun kebijakan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung teori stakeholder yang menyatakan bahwa pemerintah daerah harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya keuangan yang optimal. Tingginya PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui kontribusi pajak dan retribusi.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Perimbangan menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan antar daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sari dan Halmawati (2021) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat membantu daerah dalam membiayai kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, terutama bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah.

Namun demikian, ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap Dana Perimbangan dapat menurunkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Fenomena ini dikenal sebagai *flypaper effect*, yaitu kondisi ketika pemerintah daerah lebih mengandalkan dana transfer dibandingkan meningkatkan PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber pendapatan lokal agar tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan aset tetap mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yuliansyah et al. (2020) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Peningkatan belanja modal menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.

Belanja modal yang efektif juga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah karena pembangunan infrastruktur yang baik akan mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan penerimaan daerah di masa mendatang. Namun, pengalokasian belanja modal harus dilakukan secara tepat sasaran agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan ukuran yang besar cenderung memiliki kapasitas sumber daya dan aset yang lebih besar dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Firmansyah et al. (2024) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah dengan total aset yang besar umumnya memiliki kemampuan administrasi dan pengelolaan keuangan yang lebih baik dibandingkan daerah dengan ukuran kecil.

Namun demikian, ukuran pemerintah daerah yang terlalu besar juga dapat meningkatkan kompleksitas birokrasi dan biaya administrasi sehingga berpotensi menurunkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya daerah harus dilakukan secara optimal agar ukuran pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penggunaan utang yang dikelola secara baik dapat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Iszardani dan Hardiningsih (2021) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah. Penggunaan utang dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif dalam mendukung pembangunan daerah apabila dilakukan secara hati-hati dan sesuai kemampuan fiskal daerah.

Namun demikian, *Leverage* yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko fiskal pemerintah daerah dan mengurangi fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebelum melakukan pembiayaan melalui utang agar stabilitas fiskal tetap terjaga.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Leverage* merupakan faktor penting yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan yang optimal terhadap faktor-faktor tersebut akan membantu pemerintah daerah meningkatkan kemandirian fiskal, efektivitas pengelolaan anggaran, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Leverage* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia periode 2020–2023. Pendapatan Asli Daerah terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena tingginya PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan lokal, maka semakin baik tingkat kemandirian fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.

Dana Perimbangan juga berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat membantu daerah dalam

memenuhi kebutuhan anggaran, khususnya bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah. Namun demikian, ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap Dana Perimbangan dapat menghambat kemandirian fiskal daerah sehingga pemerintah daerah tetap perlu mengoptimalkan PAD sebagai sumber pendapatan utama daerah.

Belanja Modal menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena alokasi belanja modal yang tepat mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Infrastruktur yang memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, ukuran pemerintah daerah juga memengaruhi kinerja keuangan karena pemerintah daerah dengan aset dan sumber daya yang besar cenderung memiliki kapasitas pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Leverage dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan utang dapat membantu pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan apabila dikelola secara optimal. Akan tetapi, penggunaan utang yang berlebihan dapat meningkatkan risiko fiskal dan mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Oleh karena itu, pengelolaan utang daerah harus dilakukan secara hati-hati dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Leverage* yang optimal dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga memperkuat pentingnya kemandirian fiskal dan efektivitas pengelolaan anggaran dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianti, R., & Verawaty. (2020). Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(2), 45–58.
- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Pengaruh Current Ratio, Net Profit Margin, Debt To Equity Ratio Terhadap Dividen Payout Ratio. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 1275-1288. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i2.278>
- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Ketegangan Politik Timur Tengah 2025 pada Saham Energi di Indonesia. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 239-247. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i1.111>

- Amin, M. A. N. (2022). Analisis Perbandingan Abnormal return, Return saham dan Likuiditas Saham Sebelum dan Sesudah Buyback Saham. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(2), 100-109. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i2.49>
- Amin, M. A. N. (2018). Analisis Perbandingan Abnormal return dan Trading volume activity Sebelum dan Sesudah Pengumuman Pembelian Kembali Saham (Buyback Stock). *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(1), 85-99. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.42>
- Amin, M. A. N. ., Murwati, M., Oktavianti, S. ., & Saputra, B. (2026). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Operasional: Bukti dari Sektor Consumer Non-Cyclicals Pada Bursa Efek Indonesia. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 467–475. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.242>
- Andriyani, D., Rahmawati, N., & Putra, A. (2020). Analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(1), 77–89.
- Apridiyanti, D. (2019). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 12–25.
- Arina, F., Yuliana, R., & Hidayat, T. (2019). Pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 101–113.
- Asari, M., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), 2185–2210.
- Atmoko, A., & Khairudin, M. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Governance Indonesia*, 6(2), 112–124. <https://doi.org/10.30599/jagi.v6i2.2022>
- Aya, R., Sari, N., & Putri, M. (2022). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(1), 55–67.
- Badjira, B., Karim, A., & Yusuf, M. (2017). Analisis rasio keuangan daerah dalam menilai kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 87–99.
- Bilqis, N., & Priyono, A. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 35–49.
- Coryka, D., & Wibawa, R. (2023). Pengaruh stewardship terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Manajemen Publik*, 9(1), 66–79.
- Darmastuti, L., Hidayat, S., & Nugroho, A. (2022). Ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 13(2), 90–104.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (2007). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.5465/amr.1997.9707180258>

- Endaryanto, T. (2018). Dana perimbangan dan pengaruhnya terhadap pembangunan daerah. *Jurnal Keuangan Negara*, 5(2), 44–57.
- Ermawati, E., & Aswar, K. (2020). Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 9(1), 1–14.
- Faizah, N., Rahmawati, I., & Suryani, E. (2024). Analisis laporan realisasi APBD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik Indonesia*, 12(1), 88–102.
- Fajar, M., Santoso, B., & Widodo, T. (2023). Kemandirian fiskal daerah dan pengaruhnya terhadap stabilitas ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Regional*, 18(1), 23–39.
- Fauziyah, N., & Ekaningtias, D. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Daerah*, 11(2), 50–63.
- Firmansyah, R., Putra, H., & Lestari, P. (2024). Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 16(1), 14–28.
- Ginting, R., Siregar, D., & Harahap, N. (2019). Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 8(2), 91–105.
- Harjito, Y., Wahyudi, S., & Kurniawan, R. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 24(1), 45–59.
- Harumiati, Y., & Payamta. (2014). Ketidakstabilan sumber pendanaan dan dampaknya terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 377–390.
- Hasanuddin, A., Syamsuddin, R., & Putra, E. (2022). Partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam perspektif stewardship theory. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 115–128.
- Hasnita, R. (2021). Analisis rasio efisiensi dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Keuangan dan Kebijakan Publik*, 9(2), 77–90.
- Herizal, H., Sari, P., & Anwar, M. (2020). Penerapan teori stakeholder dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Governance*, 5(1), 32–45.
- Insani, N., Rahayu, T., & Wijayanti, D. (2023). Pengaruh dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis*, 15(1), 101–117.
- Iszardani, N., & Hardiningsih, P. (2021). Pengaruh *Leverage* terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Transparansi Publik*, 7(1), 54–66.
- Jatmiko, B. (2020). Ukuran pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 6(2), 88–100.
- Kamaroellah, R. (2017). Pendapatan asli daerah dan kemandirian fiskal pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 4(2), 121–132.

- Kapriana, M., & Agung, S. (2020). *Leverage* dan pengaruhnya terhadap kinerja laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 5(1), 98–112.
- Karina, D., & Nuwun, J. (2023). Belanja modal dan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Nasional*, 14(1), 70–84.
- Khawarizmi, F., & Marseto, M. (2021). Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 9(2), 110–124.
- Kumolo, A., Setiawan, D., & Rachman, H. (2023). Analisis rasio keuangan pemerintah daerah sebagai alat ukur kinerja keuangan. *Jurnal Administrasi Keuangan*, 12(1), 66–79.
- Kusuma, A., & Anwar, M. (2024). Stabilitas ekonomi daerah dan pengelolaan fiskal pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi Makro Indonesia*, 19(1), 15–29.
- Littau, P., Jujagiri, N., & Adlbrecht, G. (2010). 25 years of stakeholder theory in management research. *Journal of Business Ethics*, 96(3), 403–429. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0379-0>
- Mahanani, F., & Maskudi, M. (2020). Efektivitas belanja modal dalam meningkatkan pelayanan publik daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 8(2), 130–144.
- Mappiasse, M. (2018). Karakteristik pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 55–68.
- Melda, R., & Syofyan, E. (2020). Fenomena flypaper effect pada pemerintah daerah di Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 145–159.
- Mu'alimah, N., & Ervina, R. (2023). Pengaruh PAD terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 13(1), 72–86.
- Nahak, M., Astuti, S., & Sugiarti, D. (2023). Kepatuhan wajib pajak daerah dan pengaruhnya terhadap realisasi PAD. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 10(2), 41–53.
- Niswani, R., Kurniasih, D., & Pratama, A. (2022). Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Publik*, 7(1), 25–38.
- Nurhaeda, N., & Tenriola, T. (2022). *Leverage* dan risiko fiskal pemerintah daerah. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Publik*, 5(2), 67–80.
- Putra, R., Anisa, D., & Kurniawati, S. (2023). Transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam perspektif stakeholder theory. *Jurnal Governance Indonesia*, 11(1), 90–104.
- Putri, D., & Darmayanti, N. (2019). Pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Sarbagita Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(2), 1120–1138.
- Putri, M., & Ratnawati, V. (2023). Evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 14(2), 98–111.
- Radjak, L., & Latarang, M. (2021). Flypaper effect pada pemerintah daerah Provinsi Gorontalo.

Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 17(1), 55–69.

- Rahmawati, Y., & Putri, A. (2023). Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 10(1), 80–94.
- Ratnasari, D., & Meirini, R. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 17(2), 120–136.
- Riani, A., & Hrp, M. (2022). *Leverage* dan pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Keuangan Daerah*, 6(1), 34–48.
- Sari, M., & Halmawati, H. (2021). Pengaruh PAD dan dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(2), 356–370.
- Sayuti, M., Harahap, A., & Nasution, D. (2018). Transparansi anggaran pemerintah daerah dalam perspektif stakeholder theory. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 4(1), 44–58.
- Setiawan, D., & Setyorini, W. (2018). Belanja modal dan peningkatan kualitas pelayanan publik daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 6(2), 77–90.
- Sunarti, S., Wijaya, A., & Nugroho, H. (2019). Pengelolaan aset daerah dan implikasinya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Manajemen Keuangan Daerah*, 5(1), 90–103.
- Suriatman, S., & Syamsul, A. (2021). Analisis rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi Publik*, 8(2), 65–79.
- Ubels, H., Acosta, M., & Haverkort, B. (2019). Local governance and financial independence in regional development. *Public Administration Review*, 79(3), 412–425. <https://doi.org/10.1111/puar.13001>
- Van Meerkerk, I., Edelenbos, J., & Klijn, E. H. (2018). The influence of governance networks on regional financial management. *Government Information Quarterly*, 35(4), 567–576. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.08.004>
- Wulandari, D., Setyawan, H., & Prakoso, B. (2022). Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 12(1), 33–47.
- Yanida, R., Nurhayati, S., & Fauzan, A. (2013). Partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja pegawai pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 4(2), 101–114.
- Yuliansyah, Y., Putri, F., & Rahman, A. (2020). Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 21(1), 95–108.
- Yusmina, D., & Dodik, H. (2023). Pengendalian internal dan kompetensi pengelola terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik Indonesia*, 15(2), 140–154.